

REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KOLONIAL BELANDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIKOTOMI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Fathusy Syarif

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
* fathusysyarif1234@gmail.com

Adam Maulana

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
* adammaulan699@gmail.com

Rafka Bulan Nafisa

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
* bulannafisa26@gmail.com

Marhamah Putri

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
* marhamahp4@gmail.com

Aprizal Ahmad

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
* apriz9472@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the epistemology of Islamic education during the Dutch colonial period and its implications for the emergence of educational dichotomy in Indonesia. The research employs a qualitative approach with a library research method through the exploration of historical literature and conceptual analysis of relevant primary and secondary sources, including colonial educational archives, scholarly works, and the writings of Islamic reformers. The findings reveal that during the colonial era, Islamic education experienced epistemological marginalization due to the Dutch ethical policy emphasizing secular and rationalistic education. Meanwhile, Islamic institutions such as pesantren, surau, and madrasah maintained a knowledge paradigm rooted in revelation and classical scholarly traditions. The tension between these two systems generated an epistemological dualism that separated religious and secular sciences. The Western paradigm, which divorced spirituality from rationality, later influenced postcolonial

educational policy, marginalizing moral and religious values within the modern education system. In the contemporary context, this dichotomy persists through the division between general and religious education, with an evaluation system prioritizing cognitive achievements over affective and spiritual dimensions. Therefore, reconstructing the epistemology of Islamic education is essential to harmonize revelation and reason, integrating both religious and modern sciences to create a holistic, civilized education system grounded in tawhid, morality, and humanity.

Keywords: colonialism, educational dichotomy, epistemology of Islamic education, integration of knowledge, Netherlands.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda serta implikasinya terhadap munculnya dikotomi pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui penelusuran literatur historis dan analisis konseptual terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan, seperti arsip pendidikan kolonial, karya ilmiah, dan kajian tokoh-tokoh pembaharu Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa kolonial, pendidikan Islam mengalami marginalisasi epistemologis akibat kebijakan politik etis Belanda yang menekankan sistem pendidikan sekuler dan rasionalistik. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah tetap mempertahankan paradigma keilmuan berbasis wahyu dan tradisi ulama klasik. Ketegangan antara dua sistem pengetahuan ini melahirkan dualisme epistemologis, yakni pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Paradigma Barat yang memisahkan spiritualitas dari rasionalitas kemudian memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional pascakolonial, sehingga aspek moral dan keagamaan cenderung terpinggirkan dalam sistem pendidikan modern. Dalam konteks kontemporer, dikotomi pendidikan masih terlihat melalui pemisahan antara lembaga pendidikan umum dan keagamaan, serta orientasi sistem penilaian yang lebih menonjolkan capaian kognitif dibanding aspek afektif dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam yang menempatkan wahyu dan akal dalam posisi harmonis. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern, tetapi juga untuk membangun sistem pendidikan yang holistik dan berkeadaban, berlandaskan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan kemanusiaan. Dengan demikian, integrasi epistemologis menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berakar pada spiritualitas Islam sekaligus responsif terhadap tantangan modernitas.

Kata Kunci: epistemologi pendidikan Islam, masa Belanda, dikotomi pendidikan, integrasi keilmuan, kolonialisme.

PENDAHULUAN

Epistemologi pendidikan Islam merupakan kajian mendasar tentang sumber, hakikat, dan tujuan pengetahuan dalam perspektif Islam. Dalam konteks sejarah Indonesia, epistemologi ini mengalami tantangan serius pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang sekuler, rasional, dan pragmatis dengan tujuan utama mencetak tenaga kerja yang patuh terhadap kepentingan kolonial (Daulay, 2021). Sementara itu, pendidikan Islam yang telah berkembang sejak abad ke-13 melalui pesantren, surau, dan madrasah tradisional mengalami marginalisasi.

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejarah kolonialisme Belanda yang membawa perubahan mendasar terhadap arah dan struktur pendidikan nasional. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan bercorak Barat yang bersifat sekuler dan administratif, dengan tujuan utama menyiapkan tenaga kerja pribumi yang dapat mendukung kepentingan kolonial. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah tradisional tetap beroperasi secara mandiri di luar sistem pendidikan formal kolonial tanpa memperoleh dukungan struktural dari pemerintah. Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan yang kemudian berkembang menjadi dualisme pendidikan antara sistem sekuler kolonial dan sistem keagamaan Islam.

Kesenjangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga epistemologis. Pendidikan Barat menempatkan rasionalitas, empirisme, dan efisiensi sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran, sementara pendidikan Islam berakar pada nilai-nilai wahyu, moralitas, dan tradisi keilmuan ulama klasik. Akibatnya, muncul dikotomi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” yang hingga kini masih menjadi problem mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia. Secara historis, situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam mengalami marginalisasi epistemologis karena dianggap kurang relevan dengan tuntutan modernisasi kolonial dan pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari mulai melakukan modernisasi sistem pendidikan Islam melalui penerapan kurikulum klasikal dan integrasi metode pembelajaran baru. Fenomena ini menegaskan bahwa epistemologi pendidikan Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keilmuannya.

Hingga masa pascakolonial, dikotomi pendidikan tersebut tetap berlanjut, tercermin dalam dualisme kelembagaan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, serta perbedaan paradigma dalam sistem penilaian pendidikan nasional. Instrumen evaluasi seperti Ujian Nasional atau Asesmen Nasional lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif dan akademik, sehingga pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dan spiritualitas sering kali diposisikan secara subordinatif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan umum lebih modern dan bernilai ekonomi, sedangkan pendidikan agama dipersepsikan kurang adaptif terhadap kebutuhan profesional modern.

Dalam konteks inilah, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam menjadi penting sebagai upaya untuk menghapus dikotomi yang telah berakar lama. Melalui pendekatan integratif, seluruh cabang ilmu — baik agama maupun umum dipandang sebagai satu kesatuan yang bersumber dari Allah SWT. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan konsep double movement dari Fazlur Rahman. Rekonstruksi epistemologi tersebut diharapkan dapat melahirkan sistem pendidikan yang holistik, yang tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual peserta didik.

Selain faktor kolonialisme, dinamika epistemologi pendidikan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh proses modernisasi dan globalisasi yang berlangsung sepanjang abad ke-20 hingga kini. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk membangun sistem pendidikan nasional yang mampu mengakomodasi keragaman tradisi keilmuan, kebutuhan pembangunan nasional, serta aspirasi masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk. Namun upaya integrasi tersebut tidak berjalan secara linear. Warisan dualisme kolonial yang telah mengakar pada struktur sosial menghambat terbentuknya paradigma pendidikan yang benar-benar terpadu. Pemerintah berusaha menyatukan visi pendidikan melalui berbagai regulasi dan pembaruan kurikulum, tetapi pembedaan antara lembaga pendidikan umum dan keagamaan tetap dipertahankan melalui struktur birokrasi dan pembiayaan yang berbeda.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa problem epistemologis pendidikan Islam tidak semata-mata terletak pada perbedaan sumber pengetahuan, tetapi juga pada bagaimana negara memandang fungsi pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan modern yang berkembang pascakolonial lebih berfokus pada penyiapan sumber daya manusia untuk kebutuhan ekonomi, industri, dan administrasi negara.

Perspektif ini dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang rasional-instrumental, yang menempatkan efisiensi dan produktivitas sebagai ukuran keberhasilan pendidikan. Dalam kerangka tersebut, kajian keagamaan sering kali dipersepsikan tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi, sehingga dianggap kurang relevan. Sebaliknya, pendidikan Islam lebih menekankan pada pembentukan insan berakhlak dan berilmu melalui pembelajaran berbasis nilai, yang tidak selalu selaras dengan tuntutan produktivitas ekonomi modern.

Namun demikian, asumsi tersebut mengabaikan peran historis pendidikan Islam sebagai pilar pembentukan karakter bangsa. Sebelum datangnya kolonialisme, pesantren dan lembaga keagamaan lain berfungsi bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan budaya, ekonomi, dan bahkan perjuangan politik. Pesantren telah melahirkan jaringan ulama dan intelektual yang berkontribusi terhadap pemikiran, literasi, dan stabilitas sosial masyarakat Nusantara. Tradisi intelektual ini bersumber dari epistemologi Islam yang memadukan rasionalitas, spiritualitas, dan pengalaman empiris secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ulama Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf as-Singkili, dan Syekh Nawawi al-Bantani yang menunjukkan integrasi antara teks wahyu, penalaran filosofis, dan analisis sosial.

Pada masa modern, tantangan epistemologis menjadi semakin kompleks ketika arus globalisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia memperoleh dan memaknai pengetahuan. Teknologi digital, sains modern, dan industrialisasi mengubah orientasi pendidikan menjadi lebih praktis dan berbasis kompetensi. Hal ini memaksa lembaga pendidikan Islam untuk memperbarui metode pembelajaran, memperluas kurikulum, dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan agar tetap relevan. Madrasah dan pesantren, yang dulunya berfokus pada kajian kitab klasik, kini mulai memasukkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, dan teknologi informasi. Transformasi ini merupakan bukti bahwa epistemologi pendidikan Islam bersifat adaptif dan mampu merespons dinamika zaman, meskipun tetap menjunjung prinsip-prinsip syar'i sebagai pondasi utama.

Di sisi lain, integrasi ilmu dalam pendidikan Islam masih menghadapi persoalan mendasar terkait metodologi dan kerangka epistemologis. Dalam praktiknya, integrasi ilmu sering kali hanya diwujudkan dalam bentuk penambahan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah atau pesantren, bukan pada upaya yang lebih mendalam untuk menyatukan paradigma keilmuan. Integrasi konseptual yang sesungguhnya membutuhkan rekonstruksi epistemologi yang menempatkan ilmu agama

dan ilmu umum sebagai bagian dari kesatuan ilmu yang bersumber dari Allah. Gagasan ini telah dikembangkan oleh para pemikir kontemporer seperti Al-Attas, yang menekankan pentingnya adab sebagai dasar epistemologi Islam, dan Fazlur Rahman, yang menawarkan pendekatan hermeneutis untuk memahami teks wahyu secara kontekstual. Namun implementasi gagasan tersebut di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga dominasi paradigma Barat dalam penyusunan kurikulum nasional.

Selain itu, dualisme pendidikan juga memiliki dampak terhadap persepsi masyarakat terhadap nilai dan fungsi pendidikan Islam. Sebagian masyarakat memandang pendidikan agama sebagai jalur alternatif, bukan sebagai arus utama dalam kehidupan akademik dan profesional. Persepsi ini semakin diperkuat oleh kebijakan negara yang lebih menekankan sains dan teknologi dalam penilaian pendidikan. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang berupaya untuk “menyesuaikan diri” dengan standar pendidikan modern tanpa mempertimbangkan rekonstruksi epistemologis yang lebih fundamental. Jika hal ini terus berlanjut, pendidikan Islam berisiko kehilangan identitasnya dan hanya menjadi duplikasi dari sistem pendidikan sekuler.

Oleh karena itu, upaya rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam menjadi sangat mendesak untuk membangun pendidikan yang mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus menjaga keutuhan nilai-nilai keislaman. Rekonstruksi ini tidak hanya mencakup perumusan ulang konsep ilmu, tetapi juga harus meliputi desain kurikulum, metode pembelajaran, orientasi evaluasi, kompetensi guru, dan struktur kelembagaan pendidikan. Dalam kerangka inilah, integrasi ilmu perlu dipahami sebagai proses penyatuan paradigma, bukan sekadar penyatuan mata pelajaran. Pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki keteguhan spiritual, moral, dan kepekaan sosial sesuai dengan tuntunan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis historis dan konseptual terhadap perkembangan epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda serta dampaknya terhadap munculnya dikotomi pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan interpretatif terhadap fenomena sosial dan intelektual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menelusuri

berbagai literatur, mendeskripsikan, serta menafsirkan gagasan dan peristiwa historis yang memengaruhi sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya ilmiah utama yang secara langsung membahas tentang pendidikan Islam, filsafat ilmu, epistemologi, serta kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Beberapa contoh sumber primer mencakup tulisan para tokoh pembaharu Islam Indonesia seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Nurcholish Madjid, serta arsip kebijakan pendidikan kolonial seperti laporan *Politik Etis* dan dokumen terkait lembaga pendidikan *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) atau *Kweekschool*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, disertasi, serta dokumen sejarah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dengan memberikan konteks yang lebih luas mengenai hubungan antara kolonialisme, pendidikan, dan epistemologi Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik telaah literatur dan dokumentasi. Tahap pertama adalah penelusuran sumber pustaka yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, melalui perpustakaan, repositori akademik, dan jurnal daring. Tahap kedua adalah membaca secara mendalam setiap sumber yang telah dipilih untuk menemukan gagasan pokok, argumen utama, serta data historis yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah pencatatan dan pengorganisasian data menggunakan lembar pencatatan data (data sheet) yang dirancang untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema, periode sejarah, atau kategori konseptual. Misalnya, data dapat diklasifikasikan ke dalam tema seperti “kebijakan pendidikan kolonial,” “peran lembaga Islam tradisional,” dan “epistemologi keilmuan Islam.”

Tahap berikutnya adalah analisis data, yang dilakukan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis isi (content analysis) dan analisis historis (historical analysis). Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna, ide, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sumber. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi pola pikir, asumsi epistemologis, dan pandangan dunia (worldview) yang mendasari konsep pendidikan Islam pada masa kolonial. Sementara itu, analisis historis digunakan untuk menelusuri dinamika perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa kolonial hingga pascakolonial, dengan menyoroti bagaimana interaksi antara kekuasaan kolonial dan lembaga pendidikan Islam membentuk struktur pengetahuan yang dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum.

Dalam tahap analisis, data yang terkumpul disusun secara sistematis, dibandingkan antar sumber, kemudian diinterpretasikan untuk

menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai akar epistemologis dikotomi pendidikan di Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari periode dan perspektif yang berbeda untuk memastikan keakuratan interpretasi. Hasil akhir dari proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana kolonialisme Belanda memengaruhi struktur epistemologis pendidikan Islam, serta bagaimana rekonstruksi epistemologi dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern dalam konteks pendidikan nasional.

Selain itu, untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian, dilakukan proses verifikasi dan refleksi kritis terhadap temuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti membandingkan hasil analisis dengan teori-teori epistemologi Islam klasik maupun kontemporer, seperti konsep *'ilm* menurut Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang menekankan kesatuan antara wahyu dan akal. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya berfokus pada deskripsi historis, tetapi juga melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai epistemologis Islam dalam konteks modernitas. Pendekatan reflektif ini bertujuan untuk menilai relevansi warisan intelektual Islam terhadap persoalan dikotomi pendidikan di Indonesia saat ini, serta merumuskan arah rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam yang kontekstual dan solutif. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga normatif-filosofis, karena berupaya mengaitkan temuan historis dengan upaya konseptual dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang integratif dan berkeadaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan struktural yang signifikan. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang bersifat sekuler dan administratif dengan tujuan menyiapkan tenaga kerja pribumi yang loyal terhadap pemerintahan kolonial. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah tradisional tetap beroperasi di luar sistem formal kolonial tanpa dukungan struktural dari pemerintah. Akibatnya, pendidikan Islam mengalami marginalisasi epistemologis karena dianggap tidak relevan dengan proyek modernisasi kolonial (Hamsyah, 2015).

Kebijakan tersebut melahirkan dualisme sistem pendidikan, yakni pendidikan kolonial yang berorientasi rasional-teknokratis dan pendidikan

Islam yang berorientasi pada moralitas dan spiritualitas (Siregar, 2019). Fenomena ini menandai awal munculnya dikotomi epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dualisme ini berimplikasi panjang terhadap pembentukan struktur pendidikan nasional hingga pasca-kemerdekaan (Daulay, 2021).

Epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, basis epistemiknya bersumber dari wahyu dan tradisi ulama klasik dengan sistem pengajaran berbasis hafalan, kajian kitab kuning, dan sanad keilmuan. Metode pembelajaran seperti halaqah, sorogan, dan bandongan menjadi tradisi dominan di pesantren (Muthmainnah, 2021). Kedua, pendidikan Islam berlangsung dalam lingkungan komunitas yang menumbuhkan solidaritas sosial dan keagamaan. Pesantren berfungsi sebagai pusat keilmuan dan sosial-keagamaan yang membentuk identitas kolektif umat Islam (Reza, 2018). Ketiga, tekanan kolonial melahirkan diferensiasi epistemik, di mana ilmu-ilmu agama dianggap kurang memiliki nilai ekonomi dibandingkan ilmu sekuler yang diajarkan di sekolah kolonial (Bias, 2017).

Meskipun demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam menunjukkan daya adaptasi tinggi terhadap perubahan zaman. Tokoh pembaharu seperti K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari melakukan modernisasi sistem pendidikan Islam dengan memasukkan kurikulum klasikal dan pembelajaran sistematis (Hijazi, 2011). Perubahan ini menunjukkan bahwa epistemologi pendidikan Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap inovasi tanpa kehilangan landasan nilai-nilai ilahiah.

Dari sudut pandang filsafat pengetahuan, epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial dapat dikaji melalui tiga dimensi utama :

1. Dimensi Ontologis, Objek ilmu dalam pendidikan Islam mencakup wahyu, akhlak, dan fiqh, sedangkan pendidikan kolonial berfokus pada objek material dan administratif (Hidayat, 2020).
2. Dimensi Epistemologis, Metode memperoleh ilmu dalam Islam menggunakan pendekatan tafaqquh fi al-din melalui sanad keilmuan yang sistematis, sementara sistem kolonial mengandalkan metode empiris dan rasional khas Barat (Mulyanto, 2017).
3. Dimensi Aksiologis, Pendidikan Islam menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai tujuan utama, sedangkan pendidikan kolonial mengedepankan efisiensi dan produktivitas ekonomi (Siregar, 2019). Perbedaan tujuan dan orientasi nilai ini menghasilkan dua paradigma pengetahuan yang bertolak belakang, yaitu : spiritual religius dan sekuler materialistik.

Dalam konteks modern, sistem penilaian pendidikan di Indonesia turut memperkuat dikotomi ini. Sistem nasional seperti Ujian Nasional (UN)

dan Asesmen Nasional (AN) cenderung menekankan aspek kognitif seperti literasi, numerasi, dan sains (Samrin, 2013). Hal ini menjadikan lembaga pendidikan umum lebih mudah menyesuaikan diri dengan standar tersebut, sementara lembaga Islam yang menekankan aspek spiritual dan moral cenderung terpinggirkan. Kondisi ini memperkuat pemisahan epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum (Rijal, 2016).

Dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, pola penilaian justru memperkuat perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Pemerintah melalui sistem evaluasi nasional seperti Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN) lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif atau pengetahuan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Artinya, penilaian lebih difokuskan pada kemampuan berpikir logis, analisis, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat teknis.

Akibatnya, lembaga pendidikan umum seperti sekolah negeri atau sekolah berbasis sains lebih mudah menyesuaikan diri dengan standar ini karena orientasinya memang pada pencapaian akademik. Sebaliknya, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang menekankan pada pembentukan karakter, akhlak, dan nilai spiritual, menjadi kurang diakui karena aspek-aspek tersebut sulit diukur dengan instrumen penilaian yang bersifat kuantitatif.

Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat dikotomi epistemologis, yaitu pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Padahal, dalam pandangan Islam, keduanya tidak seharusnya dipisahkan karena ilmu pengetahuan yang sejati harus membawa manusia pada pengenalan terhadap Tuhan dan pembentukan akhlak mulia. Dengan kata lain, sistem pendidikan kita masih cenderung menilai “kepintaran otak” daripada “kebijaksanaan hati”.

Budaya credentialism, yaitu pandangan bahwa keberhasilan pendidikan diukur berdasarkan nilai dan ijazah, juga memperlebar jarak antara dua sistem pendidikan tersebut (Daulay, 2021). Lembaga pendidikan Islam yang menekankan pembentukan karakter dan nilai religius sering kali tidak memperoleh pengakuan formal dalam dunia kerja yang lebih mengutamakan kompetensi akademik kuantitatif. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pendidikan umum lebih modern dan bernilai ekonomi tinggi dibanding pendidikan agama (Rijal, 2016).

Untuk mengatasi dikotomi tersebut, diperlukan rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam yang menempatkan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan paradigma. Epistemologi Islam menegaskan bahwa seluruh ilmu bersumber dari Allah SWT, baik melalui wahyu maupun akal manusia. Dengan demikian, ilmu agama dan ilmu umum seharusnya

tidak dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan sama, yaitu membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Muliawan, 2004).

Gagasan rekonstruksi ini diperkuat oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas yang memperkenalkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu memurnikan ilmu dari pengaruh sekuler dengan menanamkan nilai tauhid di setiap bidang ilmu (Al-Furqon & Fitria, 2025). Fazlur Rahman (1982) juga mengemukakan pendekatan *double movement*, yakni memahami teks wahyu dalam konteks historisnya lalu menerapkannya dalam konteks modern. Kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa integrasi ilmu agama dan ilmu umum bukan sekadar peleburan konten, melainkan penyatuan paradigma berpikir yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Dalam praktik pendidikan, integrasi epistemologis dapat diwujudkan melalui kurikulum terpadu yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan sains dan teknologi. Misalnya, pembelajaran biologi dapat dikaitkan dengan konsep *tadabbur alam*, dan pembelajaran ekonomi dengan prinsip *muamalah* dalam Islam (Azizah, n.d.). Selain itu, sistem penilaian perlu direkonstruksi agar tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga sikap spiritual dan sosial. Pendekatan berbasis proyek dan portofolio dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis sekaligus moralitas peserta didik (Rijal, 2016).

Upaya rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam tidak hanya menuntut perubahan paradigma berpikir, tetapi juga transformasi kelembagaan dan kebijakan pendidikan nasional. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan Islam melalui integrasi struktural dan fungsional dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan visi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Artinya, sistem pendidikan Islam bukan sekadar bagian dari sistem alternatif, melainkan memiliki kontribusi epistemologis dalam membangun karakter dan peradaban bangsa (Daulay, 2021).

Selain itu, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam perlu berorientasi pada pengembangan *human capital* yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Pendidikan Islam harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan spiritual dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurut Rahman (1982), pendidikan Islam modern seharusnya menumbuhkan *moral consciousness* sebagai fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, integrasi

epistemologi Islam dapat mencegah terjadinya dehumanisasi akibat sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek material dan instrumental.

Di sisi lain, modernisasi pendidikan Islam perlu menghindari jebakan westernisasi epistemologis. Artinya, pembaruan sistem pendidikan tidak boleh sekadar meniru pola Barat yang menekankan rasionalisme ekstrem dan sekularisme, melainkan harus menempatkan nilai-nilai ilahiah sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Menurut al-Attas (1993), krisis pendidikan modern bukanlah kekurangan pengetahuan, melainkan kekeliruan dalam penempatan ilmu (*loss of adab*). Oleh karena itu, tugas utama pendidikan Islam adalah mengembalikan posisi ilmu kepada tujuan sejatinya, yaitu untuk mengenal dan mengabdikan kepada Allah SWT.

Dalam konteks kurikulum, penerapan paradigma integratif dapat dimulai melalui desain kurikulum tematik yang mengaitkan antara ilmu agama dan ilmu umum secara konseptual maupun aplikatif. Misalnya, konsep keadilan sosial dalam pelajaran PPKn dapat dihubungkan dengan prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah*, atau pembelajaran ekologi dihubungkan dengan nilai-nilai khalifah *fil ardh* dalam Al-Qur'an (Azizah, n.d.). Integrasi ini tidak hanya menghapus dikotomi antara dua ranah ilmu, tetapi juga membentuk cara berpikir holistik yang mencerminkan keutuhan pandangan Islam terhadap realitas.

Selain kurikulum, penguatan epistemologi Islam juga perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai *murabbi* yang menanamkan nilai, adab, dan kesadaran tauhid. Oleh sebab itu, pelatihan guru berbasis integrative pedagogical framework harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan Islam. Menurut Hidayat (2020), guru yang memahami epistemologi Islam akan mampu menghubungkan teori dengan nilai spiritual dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memahami makna moral di baliknya.

Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang luas. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum akan memperkuat kohesi sosial umat Islam yang selama ini terbelah antara kelompok modernis dan tradisional. Dengan menyatukan paradigma keilmuan, pendidikan Islam dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara warisan keilmuan klasik dan tuntutan zaman kontemporer. Menurut Reza (2018), pesantren modern seperti Gontor merupakan contoh sukses penerapan model integratif yang menggabungkan sistem pendidikan klasik berbasis kitab dengan sistem kurikulum modern.

Akhirnya, tujuan utama rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam adalah membangun sistem pendidikan yang berkeadaban (*civilizational education system*). Sistem ini tidak hanya mencetak manusia terampil dan berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pendidikan seperti ini bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) secara seimbang (Muliawan, 2004). Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai sistem pembentukan manusia paripurna (*insan kamil*) yang mampu berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa dan dunia.

Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam menjadi langkah penting untuk menghapus dikotomi pendidikan di Indonesia. Integrasi nilai, paradigma, dan metode dapat mewujudkan sistem pendidikan yang holistik dengan menyatukan dimensi spiritual dan rasional, moral dan intelektual, serta agama dan sains dalam satu kesatuan tujuan pendidikan nasional dalam membangun peradaban.

Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda merupakan langkah penting dalam memahami akar historis sekaligus arah pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Masa kolonial menjadi titik awal terjadinya pemisahan tajam antara pendidikan agama dan pendidikan umum akibat kebijakan pendidikan Belanda yang sekuler, elitis, dan diskriminatif. Pendidikan kolonial didesain untuk mencetak tenaga kerja administratif yang patuh terhadap sistem kekuasaan, sedangkan pendidikan Islam yang berbasis pesantren, surau, dan madrasah tradisional tetap mempertahankan karakter spiritual dan moral. Konsekuensinya, muncul dikotomi epistemologis antara ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap “tradisional” dan ilmu-ilmu modern yang berorientasi pada rasionalitas dan kemajuan material.

Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam harus dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan Islam pada masa kolonial bukanlah entitas yang statis, melainkan sistem yang terus beradaptasi dengan realitas sosial-politik. Para pembaharu seperti K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai Islam dan metode pendidikan modern memungkinkan terciptanya sintesis epistemologis yang relevan dengan zaman. Dalam konteks ini, rekonstruksi berarti menafsir ulang nilai-nilai dasar epistemologi Islam—seperti tauhid, adab, dan ta'dib—dalam bingkai ilmu pengetahuan modern, tanpa kehilangan orientasi spiritualnya.

Proses rekonstruksi tersebut melibatkan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi ontologis, yakni penegasan bahwa seluruh ilmu, baik agama maupun umum, memiliki sumber yang sama, yaitu Allah SWT sebagai al-'Alim. Kedua, dimensi epistemologis, yang menuntut metode pencarian ilmu tidak hanya berdasarkan rasionalitas empiris seperti dalam tradisi Barat, tetapi juga melalui intuisi, wahyu, dan etika keilmuan Islam. Ketiga, dimensi aksiologis, yang menekankan bahwa ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan umat manusia dan pengabdian kepada Tuhan, bukan sekadar kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

Implikasi dari rekonstruksi ini sangat penting bagi sistem pendidikan Indonesia. Dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang diwariskan sejak masa kolonial telah menciptakan ketimpangan epistemik dan sosial. Pendidikan umum dinilai lebih bergengsi karena berorientasi pada dunia kerja, sedangkan pendidikan Islam sering kali dipersepsikan sebagai jalan religius yang tidak produktif secara ekonomi. Padahal, secara filosofis, kedua bidang tersebut dapat disatukan dalam paradigma tauhidik yang menempatkan seluruh ilmu sebagai bagian dari ibadah dan pembangunan peradaban.

Untuk itu, paradigma rekonstruksi epistemologi Islam perlu diwujudkan melalui kurikulum integratif yang menyatukan ilmu agama dan sains dalam satu kesatuan nilai. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan pendekatan double movement Fazlur Rahman dapat dijadikan landasan teoritis dalam upaya ini. Integrasi epistemologis juga harus diikuti dengan reformasi sistem penilaian pendidikan, agar keberhasilan peserta didik tidak hanya diukur melalui aspek kognitif, tetapi juga melalui dimensi spiritual, sosial, dan moral.

Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam bukan sekadar usaha akademik, tetapi merupakan agenda kebudayaan dan peradaban. Ia menuntut penyatuan kembali dua arus besar pengetahuan—agama dan sains—dalam satu sistem nilai yang holistik. Jika hal ini terwujud, maka dikotomi pendidikan yang diwariskan oleh kolonialisme dapat diatasi, dan pendidikan nasional Indonesia akan kembali berfungsi sebagaimana mestinya: mencetak insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda tidak hanya menghadapi persoalan struktural,

tetapi juga permasalahan paradigmatik. Secara struktural, sistem pendidikan Islam mengalami marginalisasi karena tidak memperoleh dukungan formal dari pemerintah kolonial yang lebih memprioritaskan pendidikan sekuler berorientasi administrasi dan ekonomi. Sementara secara paradigmatik, pendidikan Islam dihadapkan pada dominasi rasionalisme dan sekularisme Barat yang mendasari sistem pendidikan kolonial. Kondisi tersebut menimbulkan marginalisasi epistemologis terhadap pendidikan Islam yang berakar pada wahyu dan tradisi keilmuan ulama klasik, sehingga melahirkan dualisme sistem pendidikan yang bertahan hingga masa kini.

Dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan kolonial mencerminkan benturan antara dua paradigma epistemologis yang berbeda, yaitu epistemologi wahyu yang bersifat teosentris dan epistemologi rasional-empiris yang bersifat antroposentris. Pendidikan Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk akhlak mulia, sedangkan pendidikan kolonial menempatkan ilmu sebagai alat untuk menguasai alam dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan pendidikan kolonial lebih menonjol dalam sistem sosial, sementara pendidikan Islam dipersepsikan sebagai tradisional dan kurang produktif. Akibatnya, orientasi pendidikan nasional pascakolonial turut mewarisi dikotomi epistemologis ini, dengan kecenderungan menilai keberhasilan pendidikan berdasarkan capaian kognitif dan materialistik.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa warisan kolonial dalam bentuk dikotomi epistemologis masih kuat memengaruhi sistem pendidikan Indonesia kontemporer. Kebijakan evaluasi nasional, seperti Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), lebih menitikberatkan pada kemampuan literasi, numerasi, dan sains, sementara aspek afektif dan spiritual belum memperoleh perhatian proporsional. Hal ini berimplikasi pada terbentuknya orientasi pendidikan yang lebih mengutamakan “kepintaran otak” dibanding “kebijaksanaan hati.” Dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993), krisis pendidikan modern bukan terletak pada kekurangan pengetahuan, melainkan pada kesalahan dalam menempatkan ilmu atau *loss of adab*.

Dari perspektif filosofis, akar permasalahan dikotomi pendidikan di Indonesia terletak pada keretakan epistemologis antara dua sistem pengetahuan: ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam dan pendidikan umum berjalan dalam dua jalur yang terpisah karena perbedaan dalam memandang sumber, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, seluruh ilmu pada hakikatnya bersumber dari Allah SWT

sebagai al-'Alim, sehingga tidak terdapat pemisahan antara ilmu yang bersifat keagamaan dan ilmu yang bersifat duniawi. Pemisahan tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan kesatuan antara wahyu dan akal dalam memahami realitas. Oleh karena itu, integrasi epistemologis menjadi suatu keniscayaan untuk mengembalikan kesatuan makna ilmu dalam perspektif Islam.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah memiliki potensi besar dalam mewujudkan integrasi epistemologi. Pesantren, misalnya, telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan nilai-nilai spiritual di tengah modernisasi melalui inovasi kurikulum dan sistem pembelajaran yang adaptif. Contoh konkret dapat dilihat pada Pondok Modern Darussalam Gontor yang berhasil memadukan sistem pendidikan klasik berbasis kitab dengan kurikulum modern. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum bukan sekadar ideal teoretis, melainkan dapat diterapkan secara nyata melalui desain kurikulum berbasis nilai-nilai tauhid.

Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam perlu diarahkan pada upaya mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan konsep double movement yang dikemukakan Fazlur Rahman memberikan landasan filosofis untuk rekonstruksi tersebut. Islamisasi ilmu menekankan perlunya internalisasi nilai-nilai tauhid dalam seluruh bidang ilmu, sedangkan pendekatan double movement menegaskan pentingnya memahami wahyu secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Kedua pendekatan ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan paradigma pendidikan Islam yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Selain reformasi kurikulum, integrasi epistemologi juga perlu diimplementasikan melalui peningkatan kompetensi guru. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan (teacher), tetapi juga sebagai murabbi yang menanamkan nilai, adab, dan kesadaran tauhid kepada peserta didik. Oleh karena itu, pelatihan guru berbasis integrative pedagogical framework menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam bukan semata persoalan akademik, tetapi merupakan agenda strategis bagi pembangunan peradaban bangsa. Integrasi antara nilai spiritual dan rasional, moral dan intelektual, serta

agama dan sains merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem pendidikan yang holistik dan berkeadaban (*civilizational education system*). Melalui paradigma integratif ini, pendidikan nasional Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab moral sebagai khalifah di muka bumi.

KESIMPULAN

Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda merupakan langkah fundamental dalam memahami akar historis dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum di Indonesia. Sistem pendidikan kolonial yang berorientasi sekuler, rasional, dan administratif telah menciptakan struktur dualistik yang menempatkan pendidikan Islam di posisi marginal, baik secara epistemologis maupun institusional. Akibatnya, lahir dikotomi antara ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap tradisional dan ilmu-ilmu modern yang dinilai memiliki nilai ekonomi serta prestise sosial yang lebih tinggi.

Namun demikian, pendidikan Islam menunjukkan daya adaptasi yang signifikan melalui upaya modernisasi yang dilakukan oleh para pembaharu seperti K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari. Pembaruan ini menandai dimulainya sintesis epistemologis yang berupaya memadukan nilai-nilai keislaman dengan metode pendidikan modern. Dalam kerangka filsafat pengetahuan, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam harus melibatkan tiga dimensi utama, yaitu: dimensi ontologis, yang menegaskan kesatuan sumber ilmu dari Allah SWT; dimensi epistemologis, yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris; serta dimensi aksiologis, yang mengarahkan ilmu bagi kemaslahatan manusia dan pengabdian kepada Tuhan.

Dalam konteks pendidikan nasional, rekonstruksi epistemologi Islam menjadi agenda strategis untuk mengatasi warisan dikotomi kolonial. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum perlu diwujudkan melalui kurikulum terpadu berbasis nilai tauhid, reformasi sistem evaluasi yang menilai aspek spiritual, moral, dan sosial, serta penguatan kompetensi guru sebagai agen penanaman nilai dan adab. Upaya ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam bukan hanya merupakan upaya konseptual, tetapi juga gerakan peradaban untuk membangun sistem pendidikan yang berkeadaban (*civilizational education system*). Sistem ini menempatkan integrasi antara rasionalitas dan

spiritualitas sebagai fondasi dalam membentuk insan kamil—manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia—yang mampu mengaktualisasikan ilmu sebagai sarana ibadah dan kontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa dan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Furqon, A., & Fitria, L. (2025). Rekonstruksi Epistemologi Islam dalam Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Syed M. Naquib Al-Attas. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 45–60.
- Azizah, I. N. (t.t.). *Konstruksi Epistemologi Pendidikan Islam*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Repository. <https://repository.uinsaizu.ac.id/6903/>
- Bias, R. (2017). *Transformasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, H. P. (2021). Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Garuda*, 13(2), 88–97.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hamsyah, A. (2015). *Epistemologi Pendidikan Islam di Masa Kolonial: Analisis Historis dan Filosofis*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, R. (2020). *Filsafat Ilmu dan Pendidikan Islam: Telaah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hijazi, M. (2011). *Pembaharuan Pendidikan Islam: Pemikiran Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari*. Malang: UIN Press.
- Muliawan, J. U. (2004). *Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mulyanto, S. (2017). *Metodologi Keilmuan dalam Tradisi Islam dan Barat: Sebuah Pendekatan Komparatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muthmainnah, L. (2021). *Relasi Guru dan Murid dalam Tradisi Pesantren: Kajian Epistemologis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reza, F. (2018). *Pesantren sebagai Basis Sosial dan Epistemologis Umat Islam Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Rijal, S. (2016). Integrasi Keilmuan Umum dan Agama: Upaya Menyatukan Ilmu Duniawi dan Ilmu Ukhrawi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 6(2), 113–128.
- Siregar, M. (2019). *Dikotomi Pendidikan Islam dan Umum dalam Perspektif Sejarah dan Filsafat*. Medan: Perdana Publishing.